

TEORI-TEORI IMPLEMENTASI DAN DINAMIKANYA PERTEMUAN 9-10

Prof. Dr. Novita Tresiana

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Periode	Ciri Utama Implementasi	Tokoh Kunci dan Teori	Karakteristik Utama
1970-an	Implementasi sebagai Eksekusi Teknis (Top-Down)	Pressman & Wildavsky (1973): Implementasi dianggap sebagai proses administratif dari pusat ke bawah, berfokus pada kendali pusat dan koordinasi.	Implementasi sangat terstruktur, mengandalkan arahan pusat, dengan hambatan utama berupa kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan.
1975	Implementasi sebagai Proses Dinamis	Van Meter & Van Horn (1975): Implementasi melibatkan interaksi antara tujuan kebijakan dan tindakan pelaksana, dianggap lebih dinamis.	Fokus pada sumber daya, komunikasi antar aktor, dan adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi yang berubah di lapangan.
1980-an	Implementasi sebagai Proses Politik dan Administratif (Top-Down vs Bottom-Up)	Mazmanian & Sabatier, Michael Lipsky (Street-Level Bureaucrats): Pengaruh aktor lokal dalam penyesuaian kebijakan serta keterlibatan faktor politik dan administratif.	Implementasi dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan lokal, dengan peran aktor lapangan semakin diakui.

Periode	Ciri Utama Implementasi	Tokoh Kunci dan Teori	Karakteristik Utama
1990-an	Implementasi sebagai Proses Partisipatif dan Adaptif	Matland (1995): Ambiguity-Conflict Model , peran ambiguitas dan konflik dalam menentukan keberhasilan implementasi, memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi kebijakan di lapangan.	Aktor lokal berperan besar dalam menyesuaikan kebijakan, dan fleksibilitas dianggap penting untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas situasi.
2000-an	Implementasi sebagai Kolaborasi dan Partisipasi	Democratic Governance: Partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan menjadi penting.	Kebijakan yang sukses melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kerjasama publik-swasta dan partisipasi masyarakat yang kuat.
Kontemporer	Implementasi sebagai Kepercayaan dan Keterlibatan	Trust and Involvement Theory: Kepercayaan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat meningkatkan keberhasilan implementasi dan rasa memiliki terhadap hasil kebijakan.	Kepercayaan dan keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan.

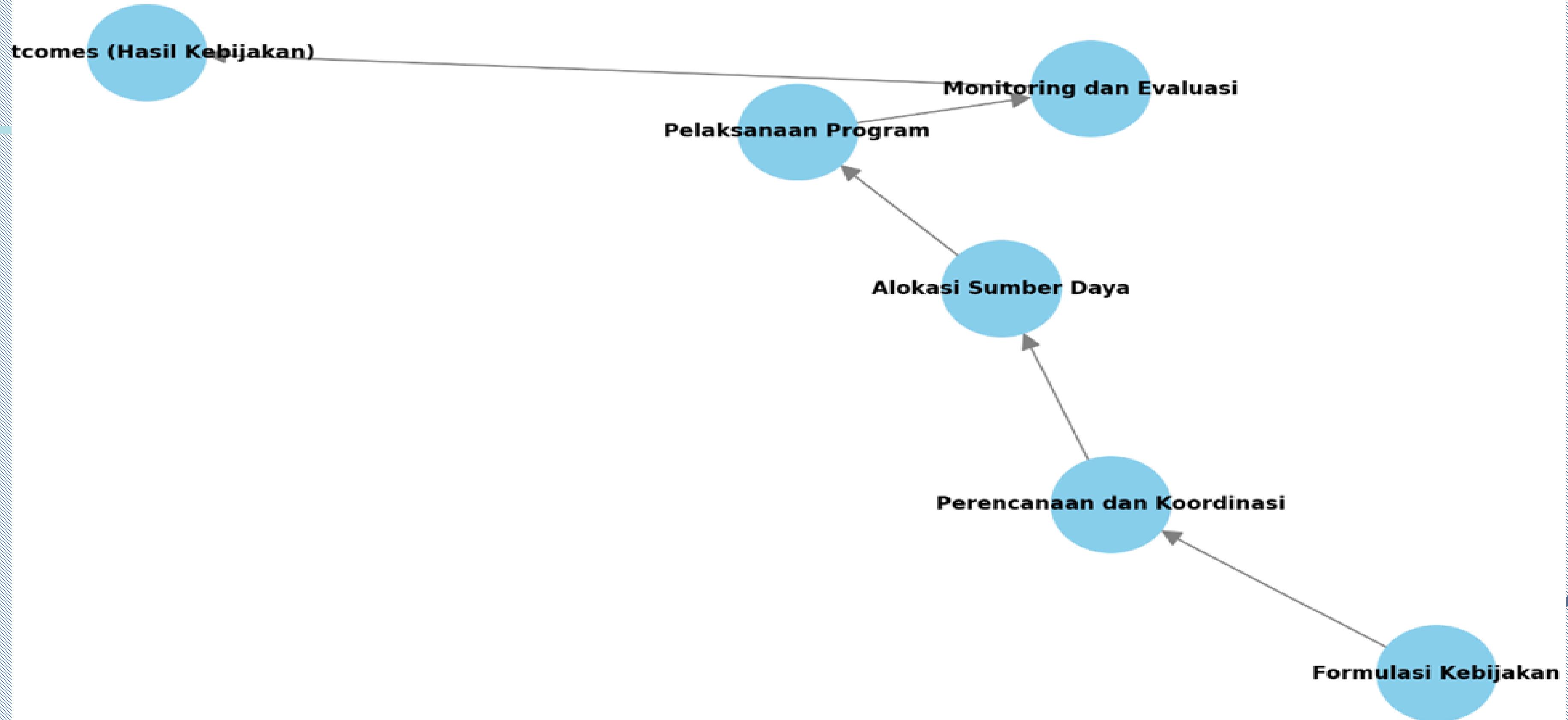
CONTOH : EKSEKUSI TEHNIS DAN KOTEMPORER

Aspek	Eksekusi Teknis	Kontemporer (Kepercayaan dan Keterlibatan)
Pendekatan	Top-Down, Kendali dari Pusat	Bottom-Up dan Kolaboratif
Peran Aktor	Terutama aktor birokrasi dan pemerintah pusat	Melibatkan masyarakat, sektor swasta, pemerintah lokal, dan aktor non-pemerintah
Proses Implementasi	Tersentralisasi, mengikuti prosedur dan aturan baku	Adaptif dan partisipatif, menyesuaikan dengan konteks lokal
Tujuan	Efisiensi dan efektivitas administratif	Kepemilikan dan legitimasi kebijakan oleh masyarakat
Pengukuran Keberhasilan	Berbasis indikator kuantitatif dan target yang jelas	Berbasis partisipasi, dampak sosial, dan perubahan kualitas hidup
Fleksibilitas	Minim fleksibilitas, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan	Fleksibel, bisa berubah sesuai kondisi lapangan
Teknologi	Teknologi terutama untuk operasionalisasi teknis	Teknologi untuk komunikasi, partisipasi, dan transparansi
Partisipasi Publik	Terbatas, fokus pada implementasi yang ketat dari otoritas	Sangat tinggi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan

CONTOH-CONTOH PILIHAN PENDEKATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Level Kebijakan	Contoh Kebijakan	Deskripsi Implementasi	Pendekatan Implementasi
Nasional	Program Vaksinasi COVID-19 Nasional	Program vaksinasi yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan banyak aktor lokal dan masyarakat untuk partisipasi luas.	Kontemporer, Kolaboratif
Nasional	Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional	Program terpusat yang fokus pada pembangunan jalan tol dengan kendali penuh dari pemerintah pusat, mengikuti prosedur teknis yang ketat.	Eksekusi Teknis, Top-Down
Lokal	Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas	Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari komunitas lokal untuk pengelolaan sampah melalui program daur ulang dan komposting.	Kontemporer, Bottom-Up
Lokal	Program Revitalisasi Ruang Publik di Kota	Pemerintah kota bekerja dengan masyarakat setempat untuk memperbaiki ruang publik dengan menggunakan pendekatan kolaboratif.	Kontemporer, Kolaboratif

PETA MEMAHAMI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



Tahap Implementasi Kebijakan	Deskripsi	Aktor Utama	Proses Utama
1. Formulasi Kebijakan	Tahap di mana kebijakan dirumuskan, tujuan ditetapkan, dan strategi dirancang.	Pembuat kebijakan pusat (legislatif, eksekutif), ahli kebijakan	Menetapkan tujuan kebijakan, menetapkan strategi, menyusun peraturan
2. Perencanaan dan Koordinasi	Perencanaan operasional tentang bagaimana kebijakan akan diimplementasikan, termasuk pembagian tugas, koordinasi antara lembaga, dan pengalokasian sumber daya.	Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait	Menentukan peran setiap aktor, membuat alur kerja, mengoordinasikan sumber daya dan waktu
3. Alokasi Sumber Daya	Menyediakan anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan.	Pemerintah pusat, daerah, dan badan pengelola anggaran	Menyusun anggaran, distribusi sumber daya, memastikan ketersediaan infrastruktur

Tahap Implementasi Kebijakan	Deskripsi	Aktor Utama	Proses Utama
4. Pelaksanaan Program	Pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan rencana dan arahan yang telah ditetapkan.	Birokrat tingkat bawah, pegawai publik, masyarakat	Eksekusi kebijakan, pelayanan publik, penyesuaian dengan situasi lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi	Mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana, dan melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan tercapai atau tidak.	Auditor internal, badan evaluasi kebijakan, LSM, masyarakat	Pengumpulan data, audit kebijakan, evaluasi kinerja, melakukan penyesuaian jika diperlukan
6. Outcome / Hasil Kebijakan	Hasil akhir yang diharapkan dari kebijakan tersebut, baik berupa perubahan sosial, peningkatan pelayanan publik, atau pencapaian tujuan yang ditetapkan.	Masyarakat umum, instansi pemerintah yang terkait	Pengukuran keberhasilan, dampak kebijakan pada masyarakat, analisis terhadap hasil kebijakan

TEORI-TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Teori Implementasi	Ciri Utama	Tokoh Kunci	Aplikasi dalam Kebijakan Publik
Teori Top-Down	Kebijakan diimplementasikan dari tingkat pusat ke bawah dengan kendali penuh di tangan pembuat kebijakan	Pressman & Wildavsky	Kebijakan nasional yang memerlukan instruksi pusat yang jelas
Teori Bottom-Up	Pelaksana lokal dan birokrat memiliki otonomi untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan konteks lokal	Lipsky, Elmore	Kebijakan lokal dengan otonomi tinggi untuk modifikasi kebijakan di lapangan
Teori Hybrid (Top-Down & Bottom-Up)	Pendekatan gabungan antara pengawasan pusat (Top-Down) dan otonomi lokal (Bottom-Up)	Sabatier & Jenkins-Smith	Kebijakan yang membutuhkan pengawasan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan
Model Ambiguity-Conflict	Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat ambiguitas dan konflik dalam kebijakan	Matland	Kebijakan dengan ketidakpastian dan konflik tinggi seperti kebijakan lingkungan

Teori Implementasi	Ciri Utama	Tokoh Kunci	Aplikasi dalam Kebijakan Publik
Teori Street-Level Bureaucracy	Birokrat lapangan memiliki kekuasaan besar dalam menentukan hasil implementasi kebijakan	Michael Lipsky	Kebijakan sosial yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat
Teori Kolaborasi dan Jaringan	Kolaborasi antara aktor dalam jaringan kebijakan meningkatkan keberhasilan implementasi	Provan & Kenis	Kebijakan yang memerlukan partisipasi berbagai pihak, seperti pengelolaan lingkungan
Teori Multilevel Governance	Kebijakan diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan secara terkoordinasi	Hooghe & Marks	Kebijakan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan seperti kebijakan Uni Eropa
Teori Trust and Involvement	Kepercayaan dan keterlibatan masyarakat meningkatkan keberhasilan implementasi dan rasa memiliki terhadap hasil kebijakan	Fukuyama, Putnam	Kebijakan yang memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan implementasi

TEORI LEVEL STREET BUREAUCRACY

Kebijakan	Deskripsi Implementasi	Peran Birokrat Lapangan
Kebijakan Pendidikan – Implementasi Kurikulum	Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan cara pengajaran dan pelaksanaan kurikulum di kelas, disesuaikan dengan kondisi siswa dan sumber daya yang tersedia.	Guru menentukan metode pengajaran, melakukan penilaian terhadap siswa, dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Kebijakan Kesehatan – Program BPJS Kesehatan	Tenaga kesehatan (dokter, perawat) memutuskan pelayanan berdasarkan kebijakan JKN, menyesuaikan layanan sesuai kondisi pasien dan sumber daya yang ada.	Dokter dan perawat bertanggung jawab atas keputusan langsung terkait layanan kesehatan dan penanganan pasien.
Kebijakan Sosial – Program Keluarga Harapan (PKH)	Pekerja sosial di daerah mengidentifikasi dan memverifikasi penerima bantuan, menyesuaikan keputusan berdasarkan kondisi nyata keluarga miskin.	Pekerja sosial melakukan interaksi langsung dengan penerima manfaat dan memutuskan kelayakan berdasarkan realitas di lapangan.
Kebijakan Penegakan Hukum – Aturan Lalu Lintas	Polisi lalu lintas memutuskan bentuk penegakan aturan, dengan fleksibilitas dalam memilih antara peringatan, denda, atau tindakan hukum.	Polisi lalu lintas menegakkan aturan dengan fleksibilitas, memutuskan tindakan yang paling sesuai dengan situasi.

TEORI MULTI LEVEL GOVERNANCE

Kebijakan	Deskripsi Implementasi	Aktor yang Terlibat	Pendekatan Multi-Level Governance
Kebijakan Lingkungan – Pengelolaan Hutan di Uni Eropa	Pemerintah pusat UE menetapkan standar lingkungan, sementara pemerintah nasional dan lokal menerapkan kebijakan sesuai kondisi lokal dengan koordinasi multi-level.	Uni Eropa, pemerintah nasional, pemerintah daerah, LSM	Koordinasi antara tingkat supranasional, nasional, dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan Kesehatan – Program Vaksinasi di Uni Eropa	Program vaksinasi diatur oleh lembaga kesehatan UE, namun implementasi dilakukan oleh pemerintah nasional dan lokal dengan adaptasi sesuai infrastruktur lokal.	Komisi Kesehatan Uni Eropa, pemerintah nasional, pemerintah daerah, lembaga kesehatan lokal	Pembagian peran antara lembaga supranasional dan pemerintah lokal untuk menyesuaikan kebijakan kesehatan publik.
Kebijakan Transportasi – Pengembangan Transportasi Publik di Kota-kota Besar	Pengembangan sistem transportasi publik dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, melibatkan sektor swasta dalam investasi infrastruktur.	Kementerian Transportasi, pemerintah provinsi, pemerintah kota, sektor swasta	Kolaborasi lintas pemerintah dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi.
Kebijakan Pendidikan – Desentralisasi Pendidikan di Indonesia	Desentralisasi kebijakan pendidikan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan panduan dari pusat.	Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, komite masyarakat	Desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah dengan fleksibilitas implementasi lokal.

PENDEKATAN DAN GENERASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi	Ciri Utama	Tokoh Kunci	Kebijakan
Pendekatan Top-Down	Proses implementasi dikendalikan dari tingkat atas, dengan instruksi dari pembuat kebijakan pusat yang diteruskan ke tingkat bawah.	Pressman & Wildavsky, Sabatier	Generasi Pertama: Fokus pada proses yang linier dari pusat ke pelaksana, melihat implementasi sebagai masalah kepatuhan.
Pendekatan Bottom-Up	Pelaksana lokal atau birokrat memiliki otonomi dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.	Lipsky, Elmore	Generasi Kedua: Melibatkan aktor lokal dan menekankan peran birokrat lapangan, memandang implementasi sebagai proses yang dinamis.
Pendekatan Hybrid (Top-Down & Bottom-Up)	Pendekatan gabungan yang mengakui pentingnya arahan dari tingkat pusat, namun juga memberikan fleksibilitas kepada pelaksana lokal untuk beradaptasi.	Sabatier, Jenkins-Smith	Generasi Ketiga: Memadukan aspek top-down dan bottom-up, serta memperhatikan faktor-faktor konteks, kolaborasi, dan partisipasi.

DIMENSI-DIMENSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dimensi Strategis	Deskripsi
Tujuan Kebijakan yang Jelas	Tujuan kebijakan harus spesifik, jelas, dan dapat diukur untuk memastikan arah pelaksanaan yang tepat.
Perencanaan dan Koordinasi	Koordinasi antar lembaga dan perencanaan yang matang sangat penting untuk menghindari kesalahan dan ketidaksepahaman.
Sumber Daya yang Cukup	Sumber daya keuangan, manusia, dan infrastruktur yang cukup diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
Kepemimpinan yang Efektif	Kepemimpinan yang kuat dan visioner memainkan peran penting dalam mengarahkan dan memobilisasi pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi dan Dukungan Publik	Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan.
Kapasitas Birokrasi	Birokrasi yang kompeten dan terlatih membantu dalam pelaksanaan kebijakan secara efisien dan efektif.
Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus memastikan kebijakan tetap berada di jalur yang benar dan dapat disesuaikan jika diperlukan.
Konteks Sosial dan Politik	Lingkungan sosial dan politik yang mendukung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

СОТОН-СОТОН

SINERGI TEORI MULTI LEVEL GOVERNANCE DAN TRUST-INVOLVEMENT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA

Aspek Kebijakan	Multi-Level Governance	Trust and Involvement
Koordinasi dan Peran Aktor	Melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan lokal dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.	Membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Partisipasi Masyarakat	Memungkinkan setiap tingkat pemerintahan berperan sesuai dengan kapasitasnya untuk melibatkan masyarakat.	Masyarakat diberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan gizi anak.
Distribusi Sumber Daya	Alokasi sumber daya dilakukan secara terstruktur dari pusat ke daerah sesuai dengan kebutuhan lokal.	Masyarakat turut serta dalam penyediaan sumber daya lokal, seperti bahan makanan bergizi dan dukungan sosial.
Adaptasi Kebijakan	Fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan sesuai konteks lokal sambil tetap mengikuti panduan nasional.	Program kebijakan disesuaikan dengan masukan masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan.
Monitoring dan Evaluasi	Setiap tingkat pemerintahan melakukan pengawasan sesuai tugas masing-masing untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.	Masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memberikan umpan balik terkait efektivitas program.

PENJELASAN

Kebijakan penurunan angka stunting di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga lokal. Studi ini mengintegrasikan teori **Multi-Level Governance** (MLG) dan **Trust and Involvement** dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang efektif sekaligus membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Studi ini berfokus pada bagaimana kedua teori tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mengurangi angka stunting.

Integrasi **Multi-Level Governance** dan **Trust and Involvement** dalam kebijakan penurunan stunting di Indonesia menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk keberhasilan implementasi kebijakan. **MLG** memungkinkan adanya koordinasi dan distribusi sumber daya yang lebih baik di seluruh tingkatan pemerintahan, sedangkan **Trust and Involvement** memastikan keterlibatan aktif masyarakat, yang penting untuk perubahan perilaku jangka panjang. Hasilnya adalah kebijakan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup pengembangan indikator spesifik yang mengukur tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penurunan stunting.

MODEL IMPLEMENTASI PARIWISATA ADAT DI PROPINSI LAMPUNG

Masalah dalam Pengembangan Desa Adat	Model Implementasi yang Cocok	Penjelasan Model	Strategi Implementasi
Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan	Model Bottom-Up	Memberikan otonomi kepada masyarakat adat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan tradisi lokal mereka.	Melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perumusan kebijakan melalui musyawarah adat dan pemberdayaan lokal.
Keterbatasan sumber daya ekonomi dan infrastruktur	Model Kolaborasi Jaringan (Network Collaboration Model)	Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas, sektor swasta) untuk bersama-sama mengelola sumber daya dan infrastruktur pariwisata.	Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur desa adat.
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat	Multi-Level Governance	Koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan (pusat, daerah, dan desa) untuk menyelaraskan kebijakan dan sumber daya.	Memfasilitasi forum lintas tingkat pemerintahan untuk merumuskan kebijakan terpadu dengan masyarakat adat sebagai aktor utama
Ancaman terhadap pelestarian budaya dan lingkungan karena pariwisata masa	Trust and Involvement Model	Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat melalui keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan	Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi untuk memastikan program pariwisata adat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan.

CONTOH-CONTOH PAPER/PENELITIAN MENGGUNAKAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Teori Implementasi Kebijakan	Contoh Judul Penelitian	Penjelasan Singkat
Teori Top-Down	Efektivitas Pendekatan Top-Down dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia	Meneliti efektivitas model Top-Down dalam implementasi kebijakan pendidikan di berbagai wilayah.
Teori Bottom-Up	Peran Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Komunitas	Menganalisis peran penting masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas.
Teori Hybrid (Top-Down dan Bottom-Up)	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dengan Model Hybrid	Menggunakan pendekatan hybrid untuk melihat bagaimana kebijakan lingkungan dikelola secara kolaboratif.
Model Ambiguity-Conflict	Studi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Menggunakan Model Ambiguity-Conflict	Memahami dampak ambiguitas dan konflik pada implementasi kebijakan pembangunan perkotaan.
Teori Street-Level Bureaucracy	Interaksi Birokrat Lapangan  dan Masyarakat dalam Kebijakan Bantuan	Studi peran birokrat lapangan dalam interaksi langsung dengan masyarakat
Teori Kolaborasi dan Jaringan	Implementasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan melalui Kolaborasi Jaringan di Bali	Kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan di daerah wisata terkenal.
Teori Multi-Level Governance (MLG)	Analisis Kebijakan Energi Terbarukan di Eropa dengan Teori Multi-Level Governance	Studi penerapan kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa dengan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
Trust and Involvement Theory	Pengaruh Kepercayaan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia	Analisis peran kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kesehatan dan pelayanan publik.

CONTOH-CONTOH PAPER/PENELITIAN MENGGUNAKAN MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Model Implementasi	Contoh Judul Penelitian	Penjelasan Singkat
Model Top-Down	Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan melalui Pendekatan Top-Down di Indonesia	Menganalisis efektivitas pendekatan terpusat dalam kebijakan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia.
Model Bottom-Up	Peran Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan: Pendekatan Bottom-Up di Wilayah Pedesaan	Meneliti peran penting masyarakat lokal dalam kebijakan lingkungan dengan partisipasi yang lebih tinggi di tingkat desa.
Model Hybrid	Efektivitas Model Hybrid dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Bencana di Indonesia	Menggunakan pendekatan campuran pusat-lokal untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan bencana.
Model Street-Level Bureaucracy	Peran Street-Level Bureaucrats dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia	Studi peran birokrasi lapangan dalam kebijakan bantuan sosial melalui interaksi langsung dengan penerima manfaat.
Model Multi-Level Governance (MLG)	Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim melalui Multi-Level Governance: Studi Kasus di Kawasan Asia Tenggara	Menggambarkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dalam kebijakan perubahan iklim di tingkat regional.
Model Trust and Involvement	Peran Kepercayaan dan Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di Daerah Terpencil	Menjelaskan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam kebijakan perlindungan lingkungan di wilayah terpencil.
Model Kolaborasi Jaringan (Network Collaboration)	Implementasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan melalui Kolaborasi Jaringan: Studi Kasus di Provinsi Bali	Studi kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan di daerah wisata populer.

TERIMA KASIH

